

Artikel Penelitian

Implementasi Kebijakan Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Ida Suryani¹

Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas PGRI Palembang

Informasi Artikel

Ditinjau : 05 Mei 2021

Direvisi : 27 Mei 2021

Terbit Online : 21 Juni 2021

Keywords

Principal Strategy,
Education Quality.

Korespondensi

e-mail :

ida954321@gmail.com

ABSTRACT

The headmaster as a leader has considerable responsibility for the development and progress of the school. This research describes the improvement of school quality, the principal's strategy for improving education quality. The development and progress of the school can be seen from the performance of the school headmaster and the headmaster is able to utilize the resources effectively and efficiently. As well as seeing and the task of the headmaster faced with the challenge to implement a planned and continuously organized education in developing the quality of education. The study used a qualitative approach with descriptive design and case study type. The research results include: (1) The school principal's strategy in improving the quality of education is the fulfillment of school infrastructure, professionalism of teachers, (2) implementation of the Program to improve the quality of education in schools, (3) evaluation to improve the quality of education in schools, (4) Constraints faced by schools that are problems funding the school Program.

DOI : <https://doi.org/10.22437/gentala.v6i1.11760>

PENDAHULUAN

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang cukup besar terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Perkembangan dan kemajuan sekolah dapat dilihat dari kinerja kepala sekolah yang profesional serta kepala sekolah tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Melihat peran dan tugas kepala sekolah yang begitu besar dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan pendidikan yang terencana dan tertata serta berkesinambungan dalam mengembangkan mutu pendidikan. Untuk itu dapat dilakukan dengan cara seorang kepala sekolah mempunyai visi yang jelas dan terarah (Azizah, 2016).

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pentingnya pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Undang-undang Republik

Copyright (c) 2021 Ida Suryani

[Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sekolah merupakan tempat dimana seseorang memperoleh pendidikan dan pengetahuan, sekolah sebagai wujud dari sebuah lembaga pendidikan selain itu dituntut untuk melakukan perubahan dan perkembangan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih baik agar dapat mencapai tujuan pendidikan.

Strategi adalah kerangka yang membimbing dan mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan dan arah suatu organisasi. Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarnya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Menurut Slameto (Riyanto, 2010:131) bahwa strategi adalah suatu rencana tentang pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang. Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepala sekolah sebagai seorang pimpinan di suatu lembaga pendidikan perlu mempunyai strategi tertentu untuk mengembangkan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan kerjanya. Kepala sekolah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi bagi para staf dan para siswa. Sebagai kepala sekolah di tuntut untuk mampu melakukan sebuah perubahan dan terobosan guna peningkatkan mutu dan kualitas sekolah. Dengan demikian, strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan

baik. Dalam melaksanakan peran tersebut, kepala sekolah memiliki tanggungjawab ganda yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang baik, dan melaksanakan supervisi sehingga guru-guru bertambah dalam menjalankan tugas-tugas pengajaran dan dalam membimbing pertumbuhan murid-murid. Dalam bidang pendidikan, keterampilan tehnikal adalah kemampuan kepala sekolah dalam menanggapi dan memahami serta cakap menggunakan metode pengetahuan, keuangan, pelaporan, penjadwalan dan pemeliharaan.

Menurut Wahyudi (2009:75) bahwa Kepala Sekolah selain melakukan tugas yang bersifat konseptual yaitu merencanakan, mengorganisir, memecahkan masalah dan mengadakan kerja sama dengan guru dan masyarakat juga harus mampu melaksanakan kegiatan yang bersifat praktis atau tehnikal.

Harun (2009:29) mengatakan bahwa peran kepala sekolah sebagai edukator memiliki tujuh aspek kinerjanya, yaitu: 1) prestasi sebagai guru, 2) kemampuan membimbing guru, 3) kemampuan membimbing karyawan, 4) membimbing peserta didik, 5) mengembangkan staf, 6) mengikuti perkembangan iptek, dan 7) memberi contoh mengajar yang baik.

Peningkatan mutu pendidikan persekolahan sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam memberdayakan staf pengajar dan anggota komunitasnya secara keseluruhan. Peran utama kepala sekolah antara lain adalah mengembangkan agar sekolah menjadi lembaga pendidikan yang baik dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang memiliki mutu yang baik. Artinya, bahwa mutu siswa yang dihasilkan oleh sekolah itu mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat dan menjawab tantangan moral, mental dan perkembangan ilmu serta teknologi. Siswa yang bermutu adalah siswa yang memiliki kemampuan dan potensi mengembangkan dirinya menjadi warga yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah baik itu prestasi akademis dan non akademis, dibutuhkan kompetensi kepala sekolah yang sangat mumpuni. Dengan kompetensi tersebut apa yang diinginkan oleh masyarakat dan orang tua murid yakni tercapainya keberhasilan pendidikan di sekolah dapat terwujud, sehingga sekolah dengan apa yang dimiliki dapat berjalan dari berbagai bidang. Penerapan prinsip-prinsip mutu dalam pendidikan sudah tidak dapat dielakkan dan ditawar-tawar lagi oleh penyelenggara atau

pengelola lembaga pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Sebab penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di lembaga pendidikan sudah menjadi tuntutan mutlak dari seluruh lapisan masyarakat, baik siswa, orang tua, masyarakat, pendidikan lanjut, pemerintah dan dunia usaha. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan seorang kepala sekolah harus mampu meningkatkan kinerja para guru atau bawahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diarahkan pada suatu latar atau individu yang diamati secara holistik atau utuh (Ulfatin, 2014:24) dengan rancangan deskriptif. Metode tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian dengan fokus penelitian. Penelitian ini termasuk jenis studi kasus dalam penelitian ini yaitu meneliti objek yang berhubungan langsung dengan strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta mendeskripsikan secara jelas keadaan sesungguhnya di lapangan.

Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data, peneliti melakukan display data atau pemaparan data yang telah didapatkan peneliti di lapangan, selanjutnya data tersebut direduksi, dirangkum, dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Setelah itu adalah verifikasi data dengan membuat kesimpulan yang didapat berdasarkan data yang telah direduksi. Pengecekan keabsahan data dari penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan metode (Azizah, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Strategi Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan perundangan yang berlaku, didukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Sanusi (1988:50 dalam M. Hasbullah, 2015:93) merupakan proses menjalankan, menyelenggarakan dan mengupayakan alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku.

Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan

proses penetapan kebijakan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. (M. Hasbullah, 2015:94)

a. Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1). Informasi

Dalam upaya menyatukan pemahaman, visi, dan misi dari kebijakan yang dirumuskan, maka sangat diperlukan adanya informasi. Informasi akan mengalir secara efektif jika sekelompok orang yang bekerjasama saling peduli dan terbuka. Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan.

2). Isi kebijakan

Mengingat kebijakan publik seperti pendidikan merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan pendidikan, maka isi dari kebijakan dimaksud akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir kepentingan seluruh stakeholder. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan, ketidaktepatan, ketidaktegasan intern atau ekstern, atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumberdaya pendukungnya.

3). Dukungan

Dukungan yang dimaksudkan dalam hal ini dapat berupa dukungan fisik maupun nonfisik. Apabila dalam pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Jadi pada dasarnya dukungan dimaksudkan adalah berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program.

4). Pembagian Potensi

Pada dasarnya elemen pembagian potensi berkaitan dengan kinerja koordinasi masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan karena setiap pelaku memiliki latar belakang

kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan. (M. Hasbullah, 2015:95-96) Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat di dalam program. (M. Hasbullah, 2015:92).

Penelitian ini menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn. Gagasan Teori Van Meter dan Van Horn diawali dengan pengajuan pertanyaan mengapa ada implementasi yang berhasil dan mengapa ada implementasi yang gagal. Pertanyaan itu kemudian dijawabnya sendiri dengan menyampaikan enam variabel, yakni dua variabel utama dan empat variabel tambahan yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja kebijakan. Keenam variabel tersebut meliputi: standart dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi; interorganisasi dan aktivitas pengukuhan; karakteristik agen pelaksana; kondisi social, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.

Adapun teori yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn (dalam Arif Rohman, 2012:108) ini adalah teori yang berangkat dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, sebab setiap kebijakan memiliki karakteristik sifat yang berlainan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara issue kebijakan dengan implementasi serta suatu model konseptual yang mempertautkan kebijakan dengan prestasi kerja.

b. Langkah-langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan Menurut alur pikir sesuai Kerangka Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MEN-PAN) No. PER/04/M-PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah, langkah-langkah yang ditempuh dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan adalah seperti berikut ini:

1). Penyiapan implementasi kebijakan pendidikan (0-6 bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijakan pendidikan, baik dari

kalangan pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat (publik). Tahapan sosialisasi dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta pertemuan langsung dengan masyarakat.

2). Implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa sanksi (masa uji coba) dengan jangka waktu selama 6-12 bulan dan disertai perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan.

3). Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai pengawasan dan pengendalian

4). Setelah dilakukan implementasi kebijakan pendidikan selama 3 (tiga) tahun, dilakukan evaluasi kebijakan pendidikan. (M. Hasbullah, 2015:100-101)

c. Pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan Menurut para ahli ilmu-ilmu sosial (M. Hasbullah (2015, 101-103), pendekatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan termasuk kebijakan pendidikan yaitu sebagai berikut:

1). Pendekatan Struktural Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan yang bersifat top-down yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern. Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus di rancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan supervisi menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Menurut pendekatan struktur bahwa struktur yang bersifat hierarkis-organik seperti sangat relevan untuk situasi-situasi implementasi dimana kita memerlukan suatu organisasi pelaksana yang bertingkat, yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang selalu berubah bila dibandingkan dengan suatu tim kepanitiaan untuk program kebijakan yang sekali selesai. Titik lemah dari pendekatan ini adalah proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien.

2). Pendekatan Prosedural dan Manajerial Pendekatan Prosedural dan manajerial pada dasarnya dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pendekatan struktural. Pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur-struktur birokrasi pelaksana yang cocok untuk implementasi program, namun untuk mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur manajerial dan teknik manajemen yang tepat.

3). Pendekatan Perilaku Perilaku manusia merupakan dasar dari semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan. Perilaku manusia berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik, apabila manusia dan segala sikapnya menjadi hal untuk menjadi bahan pertimbangan dan dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung dengan baik.

4) Pendekatan Politik

Pendekatan ini melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan, dengan pendekatan politik memungkinkan digunakannya sebuah paksaan dari kelompok dominan. Pendekatan politik berperan dalam bahan pertimbangan untuk mempertimbangkan segala aspek-aspek dari pengaruh perilaku dan sebagainya. Apabila hal tersebut tidak memperhitungkan kemampuan kelompok penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha dari para pendukung kebijakan yang dilaksanakan.

Strategi kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu pemenuhan sarana prasarana sekolah. Kepala sekolah berupaya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana di sekolah terutama dalam hal kegiatan belajar mengajar di sekolah, dilakukan secara insidental agar pelaksanaan belajar mengajar di sekolah dapat mencapai tujuan pembelajaran serta menunjang hasil belajar peserta didik, penetapan standar pencapaian nilai untuk mencapai mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat diukur dari hasil yang diperoleh baik itu dalam bidang akademik maupun nonakademik, pemberian arahan kepada guru maupun peserta didik.

Kepala sekolah memberikan arahan kepada guru maupun peserta didik dengan cara kepala sekolah melakukan kunjungan kelas. Adanya kunjungan kelas tersebut kepala sekolah akan mengetahui dimana letak kendala yang dialami guru maupun peserta didik dalam proses belajar di kelas, peningkatan profesionalisme guru. Kepala sekolah selalu mengupayakan agar para guru selalu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, dengan cara kepala sekolah aktif mengikutkan dirinya mupun guru dalam berbagai acara pendidikan. Acara tersebut dapat berupa pendidikan dan pelatihan bagi guru, seminar pendidikan, workshop, studi banding, adanya pembinaan khusus bagi peserta didik yang berprestasi. Kepala sekolah mengkoordinasikan peserta didik yang berprestasi berdasarkan bidang studi yang ditekuni

peserta didik tersebut tergantung bakat yang sesuai dengan bidang studinya, dilakukan kepala sekolah agar peserta didik selalu mendapatkan arahan atau bimbingan dari pembina agar peserta didik selalu dapat meningkatkan prestasinya, kepala sekolah memberikan pendekatan kepada seluruh stakeholder dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Tujuan agar tercipta suasana kekeluargaan di sekolah sehingga program-program di sekolah akan terlaksana dengan mudah (Azizah, 2016).

Perencanaan program sekolah yang berdasarkan pada 8 standar pendidikan serta mengacu pada visi, misi dan tujuan sekolah. Setiap awal tahun ajaran baru kepala sekolah, bersama dengan guru, staf, komite, serta orang tua peserta didik berkumpul untuk membahas program yang dilaksanakan oleh sekolah, apabila program-program telah tersusun dengan baik, langkah berikutnya yaitu menentukan jumlah anggaran yang akan dipakai dalam pelaksanaan program-program sekolah, membentuk tim kerja dan koordinator pengembang mutu sekolah, membuat program kerja perbidang, koordinator tim pengembang mutu melakukan koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum guna menentukan muatan program yang akan dilakukan sesuai dengan program kerja sekolah yang berhubungan dengan kurikulum, perencanaan alokasi waktu pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan fasilitas sekolah, mengomunikasikan program kerja sekolah kepada seluruh warga sekolah maupun orangtua peserta didik untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya (Azizah, 2016).

Pelaksanaan Program Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Dasar

Berikut ini adalah pemaparan program-program yang mendukung kebijakan Sekolah Dasar yaitu sebagai berikut:

1) Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar memiliki peranan penting dalam menciptakan atau membentuk keberhasilan prestasi peserta didik. Hal ini dikarenakan pendidikan di sekolah dasar merupakan dasar dari semua pendidikan. Keberhasilan tersebut tidak dapat diraih melalui satu komponen saja melainkan dari berbagai komponen. Dengan adanya kerja sama yang baik dari berbagai komponen maka akan menciptakan sekolah yang bermutu baik sesuai dengan tujuan sekolah. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar tercapai tujuan Kebijakan Sekolah Dasar yaitu dengan adanya kegiatan

ekstrakurikuler, tambahan jam pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan UF:

“untuk peningkatan mutu pendidikan itu antara lain disekolah kita melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, kalau kita ya kurikulum 2013 itu benar-benar dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu disini ada ekstra wajib, ada TI, TPA, dan bahasa inggris, semua itu digunakan untuk peningkatan mutu. Kemudian, kelas VI ada tambahan jam pelajaran dan dari kelas I-VI diterapkan oleh gurunya masing-masing.” (KS/W/03/03/2017)

Kegiatan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh SD Negeri I dimulai pada pukul 07.00 WIB diawali dengan kegiatan berdoa, mengaji, menyanyikan lagu daerah, serta literasi dilanjutkan dengan proses belajar mengajar pada pukul 07.20 WIB. Kegiatan proses belajar mengajar diselenggarakan dengan durasi 35 menit setiap satu pelajaran.

Kurikulum merupakan sebuah pedoman penyelenggaraan pembelajaran dimana bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang diterapkan di SD Negeri I yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum ini telah diterapkan sejak tahun 2013. SD Negeri I merupakan pilot project Kurikulum 2013 di Tingkat Gugus I Kecamatan.

Pelaksanaan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientific serta pendekatan yang dapat mendukung kelangsungan kurikulum tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mengaktifkan dan menumbuhkan semangat siswa serta menjadikan siswa pusat pembelajaran dan guru merupakan fasilitator siswa di dalam kelas.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program peningkatan mutu ssekolah diawali dengan pembagian tugas dengan membentuk panitia pelaksana kegiatan harian sekolah. Program dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Apabila kepala sekolah berhalangan, maka wewenang pelaksanaan program tersebut diserahkan kepada wakil kepala sekolah atau guru senior.

Pengorganisasian adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan di antara mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya.

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu mendapatkan perhatian dari kepala sekolah. Fungsi ini perlu dilakukan untuk mewujudkan struktur organisasi sekolah, uraian tugas tiap bidang, wewenang dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, dan penentuan sumber daya manusia dan materil yang diperlukan. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dengan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga, saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat dan pentingnya peranan masing-masing, dan kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah. Kepala sekolah juga tidak saja dituntut untuk melaksanakan berbagai tugasnya di sekolah, tetapi juga harus mampu menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat dalam rangka membina pribadi peserta didik secara optimal.

Faktor-faktor utama Peningkatan Mutu Pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Sudarwan Danim (2007:56) mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu:

1. Kepemimpinan Kepala sekolah; kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.
2. Guru; pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan disekolah.
3. Siswa; pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat “ sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.

4. Kurikulum; adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals (tujuan) dapat dicapai secara maksimal.

5. Jaringan Kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Utamanya guru, karena guru sebagai ujung tombak dilapangan (di kelas) yang bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran, seorang guru harus mempunyai syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajar dan membangun pembelajaran siswa agar efektif dikelas, saling bekerjasama dalam belajar sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan saling menghargai (demokratis), diantaranya :

1. Guru harus lebih banyak menggunakan metode pada waktu mengajar, variasi metode mengakibatkan penyajian bahan lebih menarik perhatian siswa, mudah diterima siswa, sehingga kelas menjadi hidup, metode pelajaran yang selalu sama(monoton) akan membosankan siswa.

2. Menumbuhkan motivasi, hal ini sangat berperan pada kemajuan dan perkembangan siswa. Selanjutnya melalui proses belajar, bila motivasi guru tepat dan mengenai sasaran akan meningkatkan kegiatan belajar, dengan tujuan yang jelas maka siswa akan belajar lebih tekun, giat dan lebih bersemangat (Slamet, 1987 :92). Jika guru memiliki kompetensi tersebut, tidak mustahil peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dapat terwujud.

Arif Rachman mengatakan bahwa setidaknya ada 4 hal penting yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan berlanjut pada mutu pendidikan di sekolah adalah:

1. Peningkatan mutu: Sekolah harus menjadi tempat yang unggul untuk kegiatan pembelajaran, memenuhi dan menyesuaikan tuntutan dan harapan undang-undang

pendidikan, visi, misi, dan tuntutan zaman, upaya sistematis dan terencana ke arah perbaikan/peningkatan mutu pendidikan,

2. Aspek peningkatan mutu: Lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang, partisipasi aktif siswa, guru, orangtua, dan semua pemangku pendidikan, manajemen yang bertanggung jawab baik moral, mandat, manusia, dan modal, memiliki standar sekolah, baik nasional dan internasional, SDM yang akuntabel, akseptabel, dan availabel,

3. Faktor utama peningkatan mutu sekolah: Pendidik dan tenaga kependidikan yang professional, proses pembelajaran aktif yang ditunjang oleh fasilitas pembelajaran, partisipasi siswa dan orangtua siswa kepada program sekolah, supervisi secara konsisten, kontinue, dan konsekuen (pengawasan yang sehat, terhadap program, pemberdayaan manusia, dan keuangan), kemitraan (pemerintah, LS, PT, badan internasional dan lainnya).

4. Program penunjang perbaikan mutu: Kreativitas kemasan kurikulum (intrakurukuler dan ekstrakurikuler), siswa siap menghadapi program pembelajaran (kesehatan, mental, pengetahuan, kebersamaan, memahami kegunaan), keadaan keuangan yang realistis dan sumber yang terpercaya.

Jadi kepala sekolah, guru, karyawan dan semua unsur pendidikan (stakeloders) mempunyai tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah terutama guru sebagai ujung tombak di kelas karena bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran. Kepemimpinan kepala sekolah dan kreatifitas guru yang professional, inovatif, kreatif, merupakan salah satu tolok ukur dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, karena kedua elemen ini merupakan figure yang bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran , kedua elemen ini merupakan fugur sentral yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat (orang tua) siswa, kepuasan masyarakat akan terlihat dari output dan outcome yang dilakukan pada setiap periode. Jika pelayanan kepada masyarakat baik maka mereka akan sadar dan secara otomatis akan membantu segala kebutuhan yang di inginkan oleh pihak sekolah, sehingga dengan demikian maka tidak akan sulit bagi pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Ada 2 pendekatan yang menjadi unsur penting dalam peningkatan mutu pembelajaran sekaligus mutu pendidikan di sekolah dalam sudut pandang mikro dan makro pendidikan, sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Pendekatan Mikro Pendidikan Yaitu suatu pendekatan terhadap pendidikan dengan indikator kajiannya dilihat dari hubungan antara elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Secara lengkap elemen mikro adalah: Kualitas manajemen, Pemberdayaan satuan pendidikan, Profesionalisme dan ketenagaan, Relevansi dan kebutuhan. Berdasarkan tinjauan mikro elemen guru dan siswa yang merupakan bagian dari pemberdayaan satuan pendidikan merupakan elemen sentral. Pendidikan untuk kepentingan peserta didik mempunyai tujuan, dan untuk mencapai tujuan ini ada berbagai sumber dan kendala, dengan memperhatikan sumber dan kendala ditetapkan bahan pengajaran dan diusahakan berlangsungnya proses untuk mencapai tujuan. Proses ini menampilkan hasil belajar. Hasil belajar perlu dinilai dan dari hasil penilaian dapat menjadi umpan balik sebagai bahan masukan dan pijakan (Ety Rochaety, 2005: 8).

2. Pendekatan Makro Pendidikan Pendekatan makro pendidikan yaitu kajian pendidikan dengan elemen yang lebih luas, yaitu dengan elemen sebagai berikut: Standarisasi pengembangan kurikulum, pemerataan, persamaan dan keadilan, standar mutu dan kemampuan bersaing. Sedangkan pendekatan makro pendidikan menyangkut berbagai hal yaitu melalui jalur pertama yaitu INPUT SUMBER – PROSES PENDIDIKAN – HASIL PENDIDIKAN (Ety Rochaety, 2005: 8). Input sumber pendidikan akan mempengaruhi dalam kegiatan proses pendidikan, di mana proses pendidikan didasari oleh berbagai unsur sehingga semakin siap dan semakin lengkap komponen pendidikan yang dimiliki suatu lembaga maka lembaga itu akan mampu menciptakan hasil pendidikan yang berkualitas.

Evaluasi Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah dilaksanakan oleh panitia atau tim yang telah dibentuk oleh kepala sekolah. Panitia pelaksana evaluasi meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas dan guru senior. Sebelum evaluasi dilaksanakan, panitia pelaksana evaluasi menyusun dan menyiapkan instrumen terlebih dahulu. Hasil evaluasi akan dilakukan

analisis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan program pada tahun berikutnya.

Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Muhaimin dkk (2010:373) mengemukakan bahwa “Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah/madrasah dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan”. Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu objek atau keadaan untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan pada sekolah.

Kendala Yang Di Hadapi Sekolah Yaitu Masalah Pendanaan Program Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah adalah kedisiplinan guru masih kurang, sebagian personel sekolah kurang komitmen dalam menjalankan program peningkatan mutu, kepala sekolah kurang tepat waktu dalam melaksanakan program peningkatan mutu, sebagian guru kurang serius ketika senior melakukan pengawasan terhadap kinerjanya. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai tugas memadukan unsur-unsur sekolah dengan situasi lingkungan budayanya, yang merupakan kondisi bagi terciptanya sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang memiliki mutu yang baik. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk itu kepala sekolah harus mengetahui tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Adapun tugas-tugas kepala sekolah menurut Wahjosumidjo (2010:97) adalah:

a. Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan. Kepala sekolah bertindak dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh bawahan. Perbuatan yang dilakukan oleh para guru, siswa dan staf dan orang tua siswa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kepala sekolah.

- b. Dengan waktu dan sumber yang terbatas seorang kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan. Dengan segala keterbatasan, seseorang kepala sekolah harus dapat mengatur pemberian tugas secara tepat serta dapat memprioritaskan bila terjadi konflik antara kepentingan bawahan dengan kepentingan sekolah.
- c. Kepala sekolah harus berpikir secara analitik dan konseptual. Kepala sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui satu analisis, kemudian menyelesaikan persoalan dengan satu solusi yang fleksibel.
- d. Kepala sekolah adalah seorang mediator atau juru penengah. Dalam lingkungan sekolah sebagai suatu organisasi di dalamnya terdiri dari manusia yang mempunyai latar belakang yang berbedabeda yang bisa menimbulkan konflik untuk itu kepala sekolah harus jadi penengah dalam konflik tersebut.
- e. Kepala sekolah adalah seorang politisi. Kepala sekolah harus dapat membangun hubungan kerjasama melalui pendekatan persuasi dan kesepakatan.
- f. Kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam berbagai macam pertemuan kepala sekolah adalah wakil resmi sekolah yang dipimpinnya.
- g. Kepala sekolah mengambil keputusan-keputusan sulit. Tidak ada satu organisasi pun yang berjalan mulus tanpa masalah. Demikian pula sekolah sebagai suatu organisasi tidak luput dari persoalan dan kesulitan-kesulitan.

Berdasarkan kutipan di atas, dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. Sehubungan dengan itu, kepala sekolah sebagai supervisor berfungsi untuk mengawasi, membangun, mengoreksi dan mencari inisiatif terhadap jalannya seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Disamping itu, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan berfungsi mewujudkan hubungan manusiawi yang harmonis dalam rangka membina dan mengembangkan kerjasama antar personal, agar secara serempak bergerak kearah pencapaian tujuan melalui kesediaan melaksanakan tugas masing-masing secara efisien dan efektif.

KESIMPULAN

Program disusun tidak semuanya berdasarkan hasil musyawarah personel sekolah. Program peningkatan mutu didokumentasikan dalam program tahunan dan program semester untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program. Pelaksanaan program peningkatan mutu diawali dengan pembagian tugas dengan membentuk panitia pelaksana kegiatan harian sekolah. Program dilaksanakan tidak seluruhnya berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Apabila kepala sekolah berhalangan, maka wewenang pelaksanaan program tersebut diserahkan kepada wakil kepala sekolah atau guru senior. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia atau tim yang telah dibentuk oleh kepala sekolah yang meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas dan guru senior. Sebelum evaluasi dilaksanakan, panitia pelaksana evaluasi menyusun dan menyiapkan instrumen terlebih dahulu. Hasil evaluasi akan dilakukan analisis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan program pada tahun berikutnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi kepala sekolah adalah kedisiplinan guru masih kurang, sebagian personel sekolah kurang komitmen dalam menjalankan program peningkatan mutu, kepala sekolah kurang tepat waktu dalam melaksanakan program peningkatan mutu, sebagian guru kurang serius ketika senior melakukan pengawasan terhadap kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlian, I. 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah (Menuju Sekolah Berprestasi)*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyasa. 2013. *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan (Online), (<http://kita.abati.blogspot.co.id/2012/12/permendiknas-rino-19-tahun-2005.html>) diakses pada 17 Maret 2016.
- Sagala, S. 2011. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sallis, E. 2008. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Terjemahan Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi. Yogyakarta: IRCiSod.

- Soetopo, H. 2009. Manajemen Berbasis Sekolah dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bunga Rampai Pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan di Indonesia). Malang: FIP UM.
- Ulfatin, N. 2014. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zulkarnain, W. 2013. Dinamika Kelompok (Latihan Kepemimpinan Pendidikan). Jakarta: Bumi Aksara.
- A Azizah, AY Sobri , 2016. Jurnal Ilmu Pendidikan. Strategi Kepaa Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.
- Ari Hendartika. (2013). “Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dalam Proses Belajar Mengajar di SMA N 1 Banjar”. Skripsi. Yogyakarta : UNY. Diambil dari://eprints.uny.ac.id/16895/1/SKRIPSI%20ARI%20HENDARTIKA.pdf, pada tanggal 29 Juni 2020.
- Dita Purnamasari. (2014). Peran Gugus Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar di Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta. Skripsi.Yogyakarta : FIP UNY.
- Edward Sallis. (2010). Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. Yogyakarta : IRCiSoD.